

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, *et al* (2021). *Penetapan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media.
- Andi Hamzah (2006), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Barda Nawawi Arief (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta, Kencana,
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dee, Mustakim La (2024). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Didik Endro Purwoleksono (2015), *Hukum Acara Pidana*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, Airlangga University Press (AUP).
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, Yase, I. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., ... Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damara Press.
- Harahap, M. Yahya (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

- Haryanto (2022), *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media.
- Korupsi, K. P. (2019). Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, ACLC KPK. Jakarta: Pusat Edukasi Antikorupsi.
- Lopa, B., & Yamin, M. (1987). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971): Pembahasan serta Penerapannya dalam Praktik. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: CV. Kencana.
- Mappi-FHUI, T. (2015). Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo dan Sudikno (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Mustaqiem. (2017). Hukum Keuangan Negara. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nur Sayidah *et al* (2019), *Akutansi Forensik dan Audit Investigatif*, Penerbit Zifatama Jawara, Sidoarjo, Maret.
- Prinst, D. (2022). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riadi Asra Rahmad (2016), *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Printing, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Salle, A., Layuk, P. K., & Pangayouw, B. J. (2021). Modul Pembelajaran Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Struktur, dan Siklus. Jayapura: Universitas Cendrawasih.

- Sarbudin Panjaitan (2018), *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* Yogyakarta, Deepublish.
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudiro, A., Rahayu, M. I., Markoni, & Arafah, W. (2025). Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis. Purbalingga: CV. Diva Pustaka.
- Suhatrizal. (2012). Tindak Pidana Korupsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Syah, Z. A. (2025). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sasangka, *et al* (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Tinuk Dwi Cahyani (2023), *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4654).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal

- Hermansyah. (2020). Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Volume 4, Issue 2, Juli 2020.
- Manurung, R. P., & Simanjutak, A. D. (2025). Strategi dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Volume 2, Nomor 2, April 2025.
- Masykur, M. A. (2020). The Existence of the State Audit Board of the Republic of Indonesia in the Presidential System. Volume 24, Issue 5.
- Negara, T. A. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. Vol. 4, Issue 1, 2023.
- Rohman, M. F. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. Vol. 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 2024.
- Simanjuntak, I., Aisyah, & Rumapea, M. S. (2021). Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan). Volume 10, Nomor 3, Agustus 2021.
- Suparyanto, B., & Nurbaedah. (2025). Kekuatan Hukum Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan (L.H.P.) Auditor Pengawasan Kejaksaan R.I. dalam Pembuktian Perkara Korupsi Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Tinjauan Kasus Penanganan Perkara Korupsi di Wilayah ...). Volume 14, Nomor 2, Inpress Desember 2025.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. Vol. 3, No. 3, November 2024.

D. Skripsi

Yuntho, E., Sari, I. D.A., Limbong, J., Bakar, R., Ilyas, F., 2014, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan

Novryantino J. Vahlevi, (2024), "*PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON*", Tesis, Program Magister Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

E. Lain-lain

Badan Pemeriksa Keuangan, "Menenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan

Populer", https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2017/otherpub__2017_1511750809.pdf, diakses pada 10 Desember 2025;

BPK Kepulauan Riau, " Keuangan Negara dan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum", <https://kepri.bpk.go.id/keuangan-negara-dan-kerugian-negara-dalam-perspektif-hukum/> diakses pada 4 Desember 2025;

detikNews, “MK Putuskan Hanya BPK yang Berhak Hitung Kerugian Negara”, https://news.detik.com/berita/d-8429046/mk-putusan-hanya-bpk-yang-berhak-hitung-kerugiannegara#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cap=swipe,education&webview=1&dialog=1&viewport=natural&visibilityState=prerender&prerenderSize=1&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.oogleg.com%2F&mp%2Fnewsdetikcom.cdn.ampproject.org%2Fc%2Fnews.detik.com%2Fberita%2Fd-8429046%2Fmk-putusan-hanya-bpk-yang-berhak-hitung-kerugiannegara%3Fusqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%25253D&_kit=1”, diakses 29 April 2026

Hidayat Salam, “Polemik Penghitungan Kerugian Negara Berpotensi Picu Ketidakpastian Hukum”, <https://www.kompas.id/artikel/polemik-penghitungan-kerugian-negara-berpotensi-picu-ketidakpastian-hukum>, diakses pada 9 Juli 2026.

Indonesia Media Center, “Jamwas Resmi Luncurkan Juknis Audit Keuangan Kejaksaan RI, Dorong Keseragaman Penghitungan Kerugian Negara”, https://www.indonesiamediacenter.com/2026/01/1_17.html”, diakses pada 25 April 2026

M. Agam Ramadansyah Irawan, “Kedudukan Bukti Audit Kerugian Keuangan Negara dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2 Januari-Juni 2026, Hlm. 949

Lensa Medan, “Revisi UU Tipikor, Baleg DPR RI Fokus Selesaikan Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Keuangan Negara”, <https://www.lensamedan.co.id/2026/05/revisi-uu-tipikor-baleg-dpr-ri-fokus.html>, diakses pada 4 Juli 2026

Kejaksaan Agung Indonesia, “Sejarah Kejaksaan”, <https://www.kejaksaan.go.id/about/story>, diakses pada 12 Desember 2025;

Kejaksaan Agung Indonesia, “Tugas dan Wewenang”, <https://www.kejaksaan.go.id/about/mision>, diakses pada 12 Desember 2025.

“Penghitungan Kerugian Negara”, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/slide-presentasi/perhitungan-kerugian-negara>, diakses pada 13 Juli 2026.